



LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN APRIL 2026



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke 08 Mei 2026

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC

NIP: 999920240117145257



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Maksud dan Tujuan	5
1.2 Ringkasan Kelembagaan	5
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	5
1.2.2 Definisi	6
1.2.3 Struktur Kelembagaan	6
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	6
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN.....	9
2.1 Rekapitulasi Kegiatan.....	9
BAB III PENUTUP	25
3.1 Kesimpulan.....	25
3.3 . Penutup	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022.....6



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan	8
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrebang OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua



- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan, di bawah :

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	JLH
		ORG
1.	Pimpinan : Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org



NO.	UNIT KERJA & JABATAN	JLH ORG
2.	Kelompok : 1. POKJA Papua Sehat	1 org
	Kerja : 2. POKJA Papua Cerdas	1 org
	(POKJA) : 3. POKJA Papua Produktif	1 org
	: 4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Administratif Provinsin Papua Salatan	3 org
4.	Staf/ : Staf/karyawan yang diperbantukan kepada Karyawan BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

BAB II **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN**

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan April 2026 terurai sebagai berikut:





1. Menghadiri Undangan Sertijab Pangdam XXIV/MT dan Pertimbangan Komando dan Staff Kodam XXIV/Mandala Trikora.

Adapun fokus kegiatan yang dilaksanakan pada tgl. 10 April 2026 di Markas Kodam Mandala Trikora Merauke adalah sebagai berikut.



- a. **Penyerahan Sertijab Pangdam XXIV/Mandala Trikora, dari Pejabat lama “Letjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.SI.” Kepada “Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E.**
- b. **Apel Penyerahan Pasukan KodamXXIV/Mandala Trikora**

2. Rapat Musrenbang OTSUS dan RKPD Kabupaten Merauke Tahun 2026



Hasil Kegiatan :

1. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 2026
2. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke terlaksana sebagian besar telah mengikuti Permen PPN No.1 Tahun 2025
3. Proses pelaksanaan Musrenbang dilakukan melalui pembahasan usulan per OPD.
4. Perwakilan Pimpinan dari setiap OPD Kabupaten Merauke sebagian besar diwakili oleh sekretaris bersama staf dinas terkait
5. Pelaksanaan Musrenbang Otsus pada SIPPP sudah menggunakan Rancangan RKPD 2027 yang dialirkan secara otomatis dari SIPD ke SIPPP Kabupaten Merauke
6. Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang diusulkan sebagian besar sesuai yang termuat dalam RAPPP.



7. Sebagian besar OPD tidak menyebutkan secara detail terkait sumber pengusul kegiatan.
8. Masih adanya usulan kegiatan baru yang urgen dari beberapa OPD yang ditambahkan pada SIPPP
9. Akhir dari pembahasan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara.
10. Tersedianya usulan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan pada Musrenbang Provinsi Papua Selatan
11. Tidak semua usulan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dari setiap OPD dapat di akomodir, karena menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

4. Menghadiri Undangan Narasumber Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Papua Selatan.



5. Rapat MUSRENBANG OTSUS dan MUSREMBANG RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027

5. Rapat MUSRENBANG OTSUS dan MUSREMBANG RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027



A. Tujuan Kegiatan :

1. Menghimpun aspirasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengidentifikasi permasalahan prioritas yang dihadapi kelompok rentan di Provinsi Papua Selatan.
3. Menyusun rekomendasi program dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Mendorong keterlibatan aktif kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam Musrenbang daerah;

5. Memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat rentan.

3. Menghadiri Undangan (Rapat Dengar Pendapat) DPR Provinsi Papua Selatan Pada Hari, Rabu 29 April 2026.

• Dengan hasil rapat kegiatan di atas Sbb ;

- a. Operasional Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri yang perlu diperhatikan
- b. Bantuan Studi Mahasiswa/i OAP yang harus didukung dengan Data yang lengkap dan akurat
- c. Ijazah yang tertunda dan tunggakan Mahasiswa agar segera dibantu
- d. Pembangunan Asrama-asrama Khusus OAP Mahasiswa yang perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan
- e. Membuat Sautu Pergub Papua Selatan Tentang Pembagian Dana OTSUS untuk Perguruan Tinggi
- f. Pembagian Dana Otsus harus secara Profesional dan Proposional
- g. Perguruan Tinggi membuat laporan pertanggung jawaban benar, transparan, dan jujur





4. Audiensi Bersama Lembaga MRP, DPRP, dan DPRK Affirmasi di Wilayah Provinsi Papua Selatan, (Jumat 30 April 2026)



Hasil Kegiatan :

1. Perlunya Data terpilih OAP;
2. Ada 92000 Anak2 yang tidak bersekolah dan putus sekolah di PPS, bagaimana jika ada intervensi lewat bantuan studi melalui Bapeda PPS, sehingga penyaluran dan penyerapan Dana Otsus tepat sasaran pada peneriman manfaatnya;
3. Persoalan Penduduk ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian yaitu tentang penataan penduduk dan pengendalian penduduk, karena berdampak pada pada layanan kesejahteraan dll, bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki identas/yang tidak terdata, Ada 80% penduduk tidak terdata;
4. Bagaimana dengan Pengendalian penduduk?. Perlu dilakukan diskusi Bersama Dukcapil, karena ada 4000 org masuk dari luar, hal ini berdampak pada akan terjadi marginalisasi OAP yang akan tersisi;
5. Perlu adanya penegasan dan pemahaman bersama terkait dengan kewenangan dalam Musreimbang Kabupaten dan Provinsi,



Dalam proses peningkatan SDM seharusnya target pencapaian disepakati oleh Provinsi dan Kabupaten, dengan merujuk hasil koordinasi dari Kementerian terkait, dan bagaimana jika belum adanya orientasi, maka kita harus kemana?;

Bagaimana dengan Papua Produktif dalam percepatannya sampai saat ini tidak jelas pembagian anggaran untuk mendukung pencapaian Papua Makmur dan Sejahtera;

Perlu untuk menjadi perhatian dalam melihat Papua Produktif, terkait ekonomi kerakyatan, dan bagaimana keterukurannya?

Usul perkuat kelembagaan, antara MRP dan DPR afirmasi, perkuat posisi di DPR, segera melakukan Kaukus Papua (Gabungan Lembaga);

Usulan kepada BP3OKP melakukan :

- a. koordinasi k/l terkait tentang pengganti PP.54, agar masuk RPP pada komisi 2 untuk melakukan pengawasaan Budgeting;
- b. perkuat fungsi kelembagaan DPR Afirmasi;
- c. Komunikasi tentang Peraturan Pemerintah untuk memperjelas Posisi DPR Afirmasi!!!;
- d. Kab. Mappi Kekurangan Transformasi dan akselerasi Infrstruktur, harus ada ruas jalan terbangun untuk mengurangi kos;

Perlu adanya pendampingan bagi pelaku Ekonomi dan permudah akses permodalan (identifikasi OAP) justifikasi tugas2 Lembaga utk mendukung pencapaian OAP Makmur dan Sejahtera;

Mendorong pembentukan Lembaga pendamping ekonomi agar bagaimana bisa berjalan seiring;

Pikirkan regulasi terkait Musrenbang dengan sangsi terkait melibatkan Lembaga-Lembaga, lihat Permen Bapenas No.1 tahun 2025.

Usul BP3OKP untuk bersinergi Bersama MRP dalam melakukan peningkatan Kapasitas pendampingan dan pengawasan Tata Kelola OTSUS bersama Kementerian terkait (Kemenkeu).;

Bagaimana dengan peningkatan kapasitas Pengusaha OAP agar memperoleh ruang dan kesempatan berkontribusi yang seluas-luasnya dalam percepatan Pembangunan melalui OTSUS dan kesinambungan dalam Pembangunan Papua Selatan yang berkelanjutan?

DPRP terkait dengan PP 54 dan 64 soal keuangan, tidak bisa kolaborasi krn Anggaran



terbatas, untuk itu perlu segera perjuangkan Perdasus !!!.

Musrenbang diharapkan adanya dinamika antara pemerintah sebagai pemateri dan perlu mempertimbangkan keberadaan DPR Afirmasi yang baru dilantik dan butuh penyesuaian kerja di DPR.

Dampak dari penyesuaian DPR Afirmasi dengan kondisi riil, dimana menghadapi situasi penyesuaian menjadi Dilema, sehingga pemahaman kewenangan terkesan tidak maksimal dalam menghadapi tugas pelaksanaan OTSUS.

Kurangnya pemahaman DPR Afirmasi tentang proteksi OTSUS yang tidak merata.

Proses adaptasi yang tidak nyaman karena adanya penggunaan Dana Otsus oleh DPR Partai Politik!!!.

Adanya kendala pelaksanaan tugas DPR Afirmasi dalam 5 tahun tidak ada hasil yang dicapai.

Tidak berpihaknya Sistem yang digunakan dalam rangka otsus pada Lembaga.

Keresahan Parpol terkait OTSUS dan RKPD perlu ditinjau lagi;

Sistem keuangan yang tidak mengcover usulan kebutuhan Otsus yang ditolak- Tidak sesuai RAP3.

perlu adanya Tindakan lanjutan dengan melakukan koordinasi Bersama Kementerian Terkait tentang penggunaan system dalam rangka Otsus;

Sejak 1963 Papua bergabung dengan NKRI, biaya yang sudah dikeluarkan sudah triliun, pada tahun 1969 jumlah OAP 800 orang, dengan jumlah penduduk awal dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan serta APBN setiap tahun milyaran, kenapa sampai saat ini OAP tidak maju-maju?, Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dari awal, Dimana Musrenbang tingkat Distrik seharusnya kita Wajib hadir, Seharusnya para pengambil keputusan dan unsur-unsur terkait harus ada hadir, agar mengetahui apa saja program yang diusulkan dan harus dikawal sampai realisasi, sehingga tidak muncul lagi pertanyaan kenapa usulan program yang diusulkan pada saat Muskam tidak ada dalam realisasi program Pembangunan;

Data terkait Pendidikan, data real Wajib ada;



Usul PSN yang masuk tanpa kompromi Bersama Masyarakat Adat, berdampak pada keresahan masyarakat, bagaimana dampak PSN terhadap keberlangsungan hidup Masyarakat adat?;

Perdasus perlindungan hak-hak OAP dalam menjalani dan menghadapi perkembangan global dalam percepatan Pembangunan Papua!!!

Tugas dari Lembaga yang keluar dari Rahim Otsus; Kita harus membentuk Kaukus;

Hasil pertemuan Bangar Dana Otsus masuk 1 pintu yang dikelola oleh Kasda, bisakah didorong Dirjen OTDA, untuk Dana Otsus sebaiknya dikelola oleh badan khusus, sehingga dikelola terpisah sehingga tidak digabung dengan OPD, Karena Implementasi 80 20 tidak berjalan, dan seharusnya perlu Regulasi perdasu dan aturan lainnya karena pergub dan perbub tidak kuat;

Setelah pertemuan ini bentuk kaukus, dan sebaiknya pertemuan seperti ini tetap berlanjut secara berkala, dan salah satu agenda yang perlu untuk dibahas bagaimana pengawasan pelaksanaan Otsus di monitoring berkala, dan perlu adanya pendampingan DPR dan MRP dalam manajemen sistem pengelolaan tata laksana Otsus

Pertegas Permen Bapenas No. 1 Tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan Musrendabg pada tingkat Kabupaten dan Provinsi, segera perlu di tindaklanjuti;

Pertegas dan perjelas hak MRP dan DPR Afirmasi dalam melaksanakan tugas mengusulkan Perdasus;

Sebagian besar OPD tidak memahami tata kelola Otsus, sehingga berdampak pada kegagalan OTSUS.



LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT APRIL TAHUN 2026

I. FORUM TEMATIK KELOMPOK RENTAN PRA-MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN (FORTEMBANG) TAHUN 2026

A. Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 31 Maret – 1 April 2026

Waktu : Pukul 08.30 – 17.00 WIT

Tempat : Halogen Hotel, Merauke

Kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan Program SKALA dan Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT) sebagai bagian dari penguatan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2027.

B. Tujuan Kegiatan :

1. Menghimpun aspirasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengidentifikasi permasalahan prioritas yang dihadapi kelompok rentan di Provinsi Papua Selatan.

3. Menyusun rekomendasi program dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Mendorong keterlibatan aktif kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam Musrenbang daerah;
5. Memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat rentan.

C. Peserta kegiatan :

1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
2. Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan
3. BP3OKP
4. Bapperida
5. Organisasi masyarakat sipil
6. Organisasi perempuan
7. Kelompok masyarakat adat
8. Kelompok anak
9. Kelompok penyandang disabilitas
10. Organisasi keagamaan
11. Perwakilan lembaga sosial dan pendidikan
12. Program SKALA dan JERAT.

D. Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan :

Sinkronisasi

Melakukan penyelarasan aspirasi dan usulan kelompok rentan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan serta program lintas OPD terkait pelayanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Harmonisasi

Mengharmonisasikan kebutuhan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan

masyarakat adat agar dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah secara inklusif dan berkeadilan.

Evaluasi

Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai persoalan strategis yang dihadapi kelompok rentan di Provinsi Papua Selatan, termasuk hambatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Koordinasi

Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, OPD teknis, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, organisasi keagamaan, serta stakeholder terkait dalam penyusunan rekomendasi pembangunan kelompok rentan sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2027.

E. Misi/Keterangan :

Papua

Sehat

Melalui pembahasan isu pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan HIV/AIDS, stunting, kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, kesehatan masyarakat adat, serta penguatan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Papua

Cerdas

Melalui penguatan akses pendidikan inklusif, pendidikan berpola asrama, pendidikan anak putus sekolah, pendidikan masyarakat adat, pendidikan bagi penyandang disabilitas, penguatan PKBM, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Papua

Produktif

Melalui rekomendasi penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan OAP, pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, penguatan ekonomi masyarakat adat, serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

F. Hasil Kegiatan :

Hasil kegiatan diperoleh melalui diskusi kelompok tematik yang terdiri dari kelompok anak, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.

1. Kelompok Anak

Kelompok anak mengidentifikasi sejumlah persoalan utama, antara lain:



- Tingginya angka anak putus sekolah;
- Penyalahgunaan lem aibon, miras, dan narkotika;
- Kasus HIV/AIDS, TBC, ISPA, dan stunting pada anak;
- Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- Kurangnya fasilitas pendidikan dan ruang publik ramah anak;
- Keterbatasan akses transportasi dan sanitasi.

Rekomendasi yang dihasilkan:

- Penyediaan rumah singgah anak;
- Pendidikan berpola asrama;
- Sosialisasi kesehatan reproduksi;
- Pembatasan penjualan miras dan zat adiktif;
- Penguatan pendidikan karakter dan parenting;
- Penyediaan layanan rehabilitasi dan pendampingan psikososial.

2. Kelompok Perempuan

Kelompok perempuan membahas isu:

- Tingginya kasus HIV/AIDS dan IMS;
- Keterbatasan layanan kesehatan dasar;
- Minimnya rumah aman korban KDRT;
- Keterbatasan pendidikan berpola asrama;
- Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan OAP.

Rekomendasi utama:

- Penguatan layanan kesehatan dasar;
- Program STOP HIV/AIDS;
- Pengaktifan kembali Kartu Papua Selatan Sehat;
- Pengembangan pendidikan berpola asrama;
- Pendampingan usaha perempuan OAP;
- Penyediaan rumah aman korban kekerasan.

3. Kelompok Disabilitas

Kelompok disabilitas mengangkat persoalan:

- Layanan kesehatan belum ramah disabilitas;
- Kurangnya kesempatan kerja;
- Minimnya pendidikan inklusif;
- Keterbatasan bantuan usaha dan fasilitas umum aksesibel.

Rekomendasi:

- Penguatan regulasi afirmatif;
- Pelatihan kerja dan afirmasi penerimaan tenaga kerja disabilitas;
- Penyediaan beasiswa khusus;
- Pengembangan fasilitas umum ramah disabilitas;
- Penguatan organisasi penyandang disabilitas.

4. Kelompok Masyarakat Adat

Kelompok masyarakat adat membahas:

- Pendataan Orang Asli Papua (OAP);
- Perlindungan hak masyarakat adat;
- Konflik wilayah adat;
- Rendahnya akses pendidikan dan kesehatan;
- Lemahnya ekonomi masyarakat adat.

Rekomendasi:

- Pendataan dan sensus OAP;
- Penyusunan PERDASI dan PERDASUS;
- Pemetaan wilayah adat;
- Pengembangan sekolah adat dan sekolah alam;
- Penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat;
- Kampanye kesehatan penyakit menular di kampung-kampung lokal.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut :

Rekomendasi :

1. Hasil Fortembang perlu diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027;
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan;
3. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kelompok rentan;
4. Perlu peningkatan pengawasan terhadap implementasi program perlindungan sosial dan layanan dasar.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Penyampaian hasil Fortembang kepada Bapperida Provinsi Papua Selatan;
2. Sinkronisasi usulan kelompok rentan dengan program OPD teknis;
3. Penyusunan dokumen prioritas pembangunan inklusif;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil forum.

H. Kesimpulan dan Saran :

Kesimpulan

Kegiatan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai usulan strategis dari kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat. Forum ini menjadi wadah penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat rentan dalam proses pembangunan daerah.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam setiap tahapan pembangunan;
2. Perlu penguatan regulasi daerah yang mendukung pembangunan inklusif;
3. Diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk program kelompok rentan;
4. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya perlu terus diperkuat.



Dokumentasi :



II. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS (MUSRENBANG OTSUS) KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2026

A. Pelaksanaan Kegiatan :

Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 14–15 April 2026

Waktu : 08.00 WIT – selesai

Tempat : Ruang Rapat BAPPERIDA Kabupaten Merauke

B. Tujuan Kegiatan :

1. Menyusun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Merauke Tahun 2027
2. Mengintegrasikan program pembangunan Otonomi Khusus dalam perencanaan daerah
3. Menyelaraskan program prioritas daerah dengan arah pembangunan Provinsi Papua Selatan
4. Mengakomodasi usulan OPD dalam kerangka pembangunan berbasis RIPP
5. Memperkuat sinkronisasi pembangunan lintas sektor dalam mendukung pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

C. Peserta Kegiatan :

Peserta kegiatan terdiri dari:

1. Pemerintah Kabupaten Merauke
2. BAPPERIDA Kabupaten Merauke
3. BP3OKP
4. Perangkat Daerah teknis
5. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
6. DPRK
7. Stakeholder pembangunan;
8. Tim desk Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif
9. Unsur pendamping teknis dan perencana.

D. Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan

Sinkronisasi

Melakukan penyelarasan program dan usulan pembangunan daerah Kabupaten Merauke dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Selatan serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).

Harmonisasi

Mengharmonisasikan usulan lintas OPD pada desk Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan Otonomi Khusus.

Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap usulan program prioritas, kesiapan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kode sub kegiatan, sumber pendanaan, serta sinkronisasi antar perangkat daerah.

Koordinasi

Melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, OPD teknis, dan stakeholder pembangunan dalam penyusunan usulan RAP Otsus Tahun 2027

A. Misi / Keterangan

Papua Sehat

Melalui penguatan akses pelayanan kesehatan dasar, pembangunan dan pengembangan puskesmas, pengelolaan kesehatan ibu dan anak, penyediaan air minum layak, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, serta penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Papua Cerdas

Melalui pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, pembangunan asrama sekolah, pengadaan perlengkapan peserta didik, peningkatan kapasitas pemuda, pengembangan sekolah berpola asrama, dan peningkatan akses pendidikan OAP.

Papua Produktif

Melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi tenaga kerja, penguatan koperasi, pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.

F. Hasil Kegiatan

Desk Papua Sehat

Pada desk Papua Sehat dibahas 25 usulan program prioritas dan seluruhnya direkomendasikan untuk mendukung pembangunan kesehatan Kabupaten Merauke Tahun 2027.

Program prioritas yang dibahas meliputi:

- Pengembangan dan pembangunan puskesmas;
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir;
- Penyediaan air minum layak dan aman;
- Penyediaan akses internet pelayanan kesehatan;
- Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai;
- Rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan.

Desk Papua Cerdas

Pada desk Papua Cerdas terdapat 25 usulan program, dengan 24 usulan direkomendasikan dan 1 usulan tidak direkomendasikan.

Program prioritas meliputi:

- Penyediaan tenaga pendidik;
- Pengadaan perlengkapan peserta didik;
- Pembangunan dan rehabilitasi asrama sekolah;
- Pengembangan sekolah berpola asrama;
- Pembinaan minat dan bakat siswa;
- Pendidikan lanjutan ASN;
- Peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga.

Desk Papua Produktif

Pada desk Papua Produktif dibahas 53 usulan program dan seluruhnya direkomendasikan.

Program prioritas meliputi:

- Pengembangan UMKM dan koperasi;
- Pelatihan vokasi tenaga kerja;
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung;
- Pengembangan sektor perikanan dan pertanian;
- Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan;
- Pengembangan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi

1. Seluruh usulan prioritas yang direkomendasikan agar ditindaklanjuti dalam penyusunan RAP Otsus Tahun 2027
2. Perlu penguatan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program
3. Perlu peningkatan kesiapan dokumen teknis dan readiness criteria usulan kegiatan
4. Program prioritas pelayanan dasar perlu menjadi fokus utama pembangunan daerah

Rencana Tindak Lanjut

1. Penyampaian hasil Musrenbang kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan
2. Sinkronisasi hasil desk dengan dokumen RKPD dan RAP Otsus
3. Penyempurnaan usulan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi desk
4. Monitoring dan pengawalan program prioritas pembangunan Kabupaten Merauke Tahun 2027.

H. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Kabupaten Merauke Tahun 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai usulan program prioritas pada sektor Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang mendukung percepatan pembangunan daerah dan implementasi Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke.

Saran

1. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas;
2. Perlu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat
3. Perlu penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program Otsus
4. Perlu keberlanjutan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan stakeholder pembangunan.



Dokumentasi :



I. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS (MUSRENBANG OTSUS) PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2027

A. Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa–Rabu, 21–22 April 2026

Waktu : 08.00 WIT – selesai

Tempat : Swissbell Hotel, Merauke

B. Tujuan Kegiatan

1. Menyusun prioritas pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2027
2. Mengintegrasikan program Otonomi Khusus dalam dokumen perencanaan daerah
3. Menyelaraskan usulan program kabupaten/kota dengan arah pembangunan Provinsi Papua Selatan
4. Mendukung percepatan pembangunan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat adat
5. Memperkuat sinkronisasi program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sesuai RIPP.

C. Peserta Kegiatan

1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel;
3. BAPPERIDA Provinsi Papua Selatan;
4. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan;
5. BP3OKP Papua Selatan;
6. MRP Papua Selatan;
7. OPD teknis;
8. RSUD;
9. Perencana daerah;
10. Stakeholder pembangunan;
11. Narasumber kementerian/lembaga pusat (Kemenkeu, Kemdagri, Bapenas)

D. Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan

Sinkronisasi

Melakukan penyelarasan usulan program Papua Sehat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan arah pembangunan nasional, RIPP, serta kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Harmonisasi

Mengharmonisasikan usulan program lintas sektor kesehatan agar selaras dengan kebutuhan pelayanan dasar, penguatan SDM kesehatan, pengendalian penyakit menular, penurunan stunting, serta pengembangan layanan kesehatan di wilayah Papua Selatan.

Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap usulan program prioritas, sumber pendanaan, kesiapan teknis, kebutuhan daerah, serta efektivitas program yang diusulkan dalam RAP Otsus Tahun 2027.

Koordinasi

Melaksanakan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BP3OKP, serta stakeholder pembangunan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan berbasis Otonomi Khusus.

A. Misi / Keterangan

Papua Sehat

Melalui penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, peningkatan layanan telemedicine, pembangunan fasilitas kesehatan, penguatan SDM kesehatan, serta pelayanan kesehatan masyarakat berbasis wilayah adat.

Papua Cerdas

Melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat, edukasi kesehatan keluarga, pengembangan pelayanan berbasis masyarakat, serta penguatan literasi kesehatan masyarakat.

Papua Produktif

Melalui penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan produktif dan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

B. Hasil Kegiatan

Hasil pembahasan Desk Papua Sehat dalam Musrenbang Otsus Tahun 2026 menghasilkan 57 usulan program yang seluruhnya direkomendasikan untuk mendukung RAP Otsus Tahun 2027.

Program prioritas yang dibahas meliputi:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar

- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif dan usia lanjut;
- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
- Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.

2. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

- Penanggulangan HIV/AIDS;
- Pengelolaan penyakit IMS;
- Pengelolaan penyakit malaria;
- Pengelolaan penyakit TB;
- Pengelolaan penyakit kusta;

- Pengelolaan penyakit filariasis;
- Pengelolaan penyakit frambusia;
- Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular.

3. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan

- Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung;
- Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
- Pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik;
- Pengadaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
- Pengembangan layanan telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak di wilayah DTPK.

4. Penguatan SDM dan Program Keluarga

- Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan;
- Peningkatan kompetensi SDM kesehatan;
- Program ketahanan keluarga;
- Penguatan PIK-R;
- Program pembangunan keluarga dan kependudukan;
- Pembinaan program pengasuhan 1000 HPK;
- Program percepatan penurunan stunting.

5. Hasil Pembahasan Kabupaten/Kota

Beberapa catatan strategis hasil desk kabupaten/kota antara lain:

1. Kabupaten Merauke mengusulkan penguatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, terutama pembiayaan rujukan pasien luar Papua dan kepesertaan BPJS masyarakat non-KTP Merauke.
2. Kabupaten Asmat membahas pengelolaan pelayanan gizi masyarakat serta pengadaan alat kesehatan dengan penekanan pada kesiapan RKO dan keberlanjutan tenaga dokter spesialis.
3. Kabupaten Boven Digoel mengusulkan pengadaan alat kesehatan antropometri dan pengembangan rumah sakit termasuk pembangunan insinerator rumah sakit.

4. Kabupaten Mappi mengusulkan pemenuhan SDM kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta pengadaan obat dan bahan medis habis pakai dengan perhatian terhadap kondisi geografis daerah.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi

1. Seluruh program prioritas Papua Sehat yang direkomendasikan agar ditindaklanjuti dalam penyusunan RAP Otsus Tahun 2027;
2. Perlu penguatan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Perlu peningkatan kesiapan readiness criteria dan dokumen teknis usulan kegiatan;
4. Program pelayanan dasar kesehatan dan penurunan stunting perlu menjadi prioritas utama pembangunan Papua Selatan.

Rencana Tindak Lanjut

1. Penyempurnaan usulan program berdasarkan hasil desk Musrenbang Otsus;
2. Sinkronisasi hasil Musrenbang dengan RKPD dan RAP Otsus Tahun 2027;
3. Koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait;
4. Monitoring dan pengawalan implementasi program Papua Sehat di kabupaten/kota.

A. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai program prioritas Papua Sehat yang mendukung percepatan pembangunan pelayanan dasar kesehatan, penguatan SDM kesehatan, pengendalian penyakit menular, pembangunan fasilitas kesehatan, serta percepatan penurunan stunting di wilayah Papua Selatan.

Saran

1. Perlu penguatan kolaborasi lintas sektor dalam implementasi program kesehatan



2. Perlu peningkatan dukungan pendanaan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan DTPK
3. Perlu penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Otsus
4. Perlu penguatan integrasi data kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.



PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

1.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 2 (April) tahun 2026, dengan rincian kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 2 tahun 2026
Bulan April 2026

Kegiatan 1	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Rabu-Kamis, 08-10 April 2026
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan
	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
	Surat Undangan Pengurus MKKS SMK Papua Selatan Insidentil : Sebutkan Alasannya
	Perintah Kerja
	Surat Tugas Nomor Tanggal
Lokasi Kegiatan	: Hotel Halogen Merauke - Papua Selatan
Judul Kegiatan	: Rapat Koordinasi SMK Setengah Papua di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	: POKJA PAPUA CERDAS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua
Pelaksana Kegiatan	: Pemerintah Provinsi Papua Selatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Papua Selatan (
Peserta Kegiatan	: Kepala Sekolah SMK Setengah Papua. Pokja Papua Cerdas BPP-PPS
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Memberikan Materi tentang Arah dan Kebijakan Pendidikan Papua sesuai RIPPP & RAPPP
Hasil/output Kegiatan	:
A. Pematери/Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegasan tentang kelembagaan BP3OKP dalam tugas fungsi dan perannya dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 2. Penegasan tentang Visi, Misi dan Dimensi Pembangunan Pendidikan melalui Pilar Papua Cerdas berdasarkan RIPPP dan RAPPP



	<p>3. Menjelaskan tentang penegasan program percepatan misi Papua Cerdas sesuai RAPPD tahun 2025-2029.</p> <p>4. Menjelaskan tentang arah kebijakan pendidikan Papua dan concern Pokja Papua Cerdas Papua Raya Tahun 2026</p>
B. Peserta/Audens	<p>: 1. Masih ada di antara peserta yang belum memahami tentang kelembagaan BP3OKP</p> <p>2. Kurangnya sosialisasi tentang program percepatan pendidikan dalam rangka Otsus Papua</p> <p>3. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah terkait dengan Tunjangan-tunjangan para guru seperti TPP yang dulu pernah ada, namun sekarang sudah dihilangkan</p> <p>4. Proses pengalihan pengelolaan SMA/K ke Dinas Pendidikan Provinsi Wajib, namun perlu adanya kajian yang maksimal agar tidak terjadi ketidaksesuaian seperti yang pernah terjadi sebelumnya dimasa yang akan datang, jangan lagi ada kebijakan trial and error.</p> <p>5. Setuju dengan Sekolah berpola asrama, namun saat ini dengan perkembangan jaman yang makin pesat belum ada Pembangunan Asrama yang dibangun pemerintah yang benar-benar sesuai tujuan, jika dibandingkan dengan masa lampau yang mana dikelola dengan baik dan banyak diantara peserta didik berpola asrama menjadi pejabat.</p> <p>6. Perlu diadakan retreat bagi para pejabat agar hatinya tulus untuk melayani masyarakat khususnya di bidang pendidikan</p> <p>7. Seabiknya dan seharusnya pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan di Papua bukan mentransformasi model pendidikan dari luar yang tidak relevan dengan kebutuhan di setiap daerah di Papua. Contohnya sekolah rakyat harus disesuaikan.</p> <p>8. BP3OKP diharapkan dapat mengevaluasi dan mengintervensi kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan pendidikan, termasuk salah satu fokus adalah Sekolah Berpola Asrama yang sudah berjalan, agar segera dilakukan normalisasi sesuai tujuannya.</p> <p>9. Jangan sampai Papua dijadikan kelinci percobaan pada program pemerintah pusat khususnya pada bidang pendidikan,</p>



	<p>sebaiknya harus menjadi prioritas yang tersasar dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam percepatan pembangunan di Papua terutama pembangunan Manusia. (ibu Ana Rumbiak Kpesek SMK Parawisata Papua).</p>
	<p>10. Pengalihan status SMA/K yang dialihkan ke Provinsi, satu tahun lalu dalam pertemuan di tempat yang sama, tentang strategi pembangunan Papua Selatan. Salah satu isu yang diangkat adalah tentang peralihan status dan sampai saat ini masih dibicarakan, kira-kira tersumbatnya dimana? Apakah tidak dibicarakan secara serius, atau apa kendalanya</p>
	<p>11. Terkait dengan program pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah pinggiran sangat diharapkan adanya kepedulian pemerintah dalam pembangunan agar sekolah-sekolah pinggiran layak dikatakan sekolah dari sarana dan prasarana serta lingkungan yang asri agar memberikan kenyamanan bagi semua kalangan khususnya peserta didik. Dinas pendidikan hanya terbatas pada pengadaan barang dan jasa, penataan lingkungan sekolah tidak ada anggarannya.</p>
	<p>12. Apakah ada program penitipan seperti perwajahan lingkungan sekolah pada dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi atau PUPR, apakah hal itu bisa dilakukan atau pernah dilakukan?</p>
	<p>13. Papua tengah: Dana Otsus seperti bintang-bintang dilangit, kita lihat kita dengar tetapi susah untuk menggapainya apalagi di sekolah, seperti <i>invisible things</i>. Ketidaktahuan sekolah tentang dana otsus yang sampai disekolah seperti apa atau tidak jelas karena tidak ada penjelasan.</p>
	<p>14. Adanya Dinas-dinas lain yang mengelola dana otsus untuk pendidikan. Perlu untuk dikoordinasikan agar dana otsus pendidikan tepat sasaran.</p>
	<p>15. Masih banyak peserta didik yang datang kesekolah dengan pakaian yang compang-camping, sepatu robek dan bahkan ada yang tidak memakai sepatu, apakah dana otsus tidak bisa dialihkan ke sekolah untuk</p>



	<p>membelajarkan pemenuhan kebutuhan siswa dalam mengikuti proses pendidikan. Dan juga adanya kesulitan transportasi khususnya peserta didik OAP. Dengan kata lain kebutuhan mendasar belajar masih sangat jauh dari layak bagi peserta didik OAP. Diharapkan melalui BP3OKP masalah ini dapat menjadi perhatian untuk dikoordinasikan terkait dengan solusi terhadap permasalahan tersebut, agar dana otsus dikelola oleh sekolah, karena pengelola satuan unit pendidikan yang mengetahui kesharian kesulitan PBM khususnya para peserta didik.</p>
	<p>16. Perlu ditetapkan mekanisme pengawasan penggunaan Dana Otsus jika dikelola oleh sekolah agar proses sejak penerimaan sampai dengan pelaksanaan PBM dapat terserap maksimal dan bermanfaat sesuai dengan tujuan pendidikan khususnya peserta didik OAP.</p>
	<p>17. Papua Pegunungan : Bagaimana melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi siswa pada bidang pertanian melalui lembaga yang dapat menerbitkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pasar?</p>
	<p>Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut : Rek. 1</p>
	<p>1. BP3OKP perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan peran strategis BP3OKP dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.</p> <p>2. Penyusunan materi sosialisasi yang sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan.</p>
	<p>RTL. 1</p> <p>1. Melaksanakan forum sosialisasi dan dialog publik secara berkala di kabupaten/kota.</p> <p>2. Menyusun buku saku, infografis, dan media digital tentang BP3OKP.</p> <p>3. Melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, dan tenaga pendidik dalam penyebarluasan informasi.</p>
	<p>Rek. 2</p> <p>Pemerintah daerah bersama BP3OKP perlu memperkuat diseminasi program pendidikan berbasis Otsus hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat.</p>



RTL. 2

1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terpadu di seluruh wilayah Papua Selatan.
2. Membuat portal informasi pendidikan Otsus yang mudah diakses sekolah dan masyarakat.
3. Menetapkan OPD penanggung jawab komunikasi publik program pendidikan Otsus.

Rek. 3

Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali kebijakan penghapusan TPP dan tunjangan guru lainnya, khususnya bagi guru di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

RTL. 3

1. Melakukan kajian fiskal dan kebutuhan riil tenaga pendidik.
2. Mengusulkan penguatan insentif guru melalui Dana Otsus dan APBD.
3. Menyusun skema afirmasi kesejahteraan guru berbasis wilayah tugas.

Rek. 4

Pengalihan kewenangan SMA/SMK harus dilakukan berbasis kajian akademik, kebutuhan daerah, dan evaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun pelayanan pendidikan

RTL. 4

1. Membentuk tim evaluasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Menyusun roadmap pengelolaan SMA/SMK yang terintegrasi.
3. Melakukan harmonisasi regulasi dan pembagian kewenangan secara jelas.

Rek. 5

Pemerintah perlu melakukan revitalisasi konsep sekolah berpola asrama berbasis budaya, karakter, disiplin, dan pembinaan holistik sebagaimana praktik baik masa lalu.

RTL. 5

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah asrama yang sudah berjalan.
2. Menyusun standar minimal pengelolaan asrama.
3. Mengembangkan pilot project sekolah asrama berbasis gereja, adat, dan komunitas lokal.



	Rek. 6
	Penguatan integritas, moralitas, dan orientasi pelayanan pejabat pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan pembinaan karakter dan spiritualitas.
	RTL. 6
	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan retreat, pembinaan etika pelayanan publik, dan leadership camp bagi pejabat pendidikan.2. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai narasumber pembinaan.
	Rek. 7
	Model pendidikan di Papua perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, geografis, dan kebutuhan masyarakat Papua.
	RTL. 7
	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kajian kontekstual pendidikan berbasis wilayah adat.2. Mengintegrasikan muatan lokal, keterampilan hidup, budaya, dan ekonomi lokal dalam kurikulum.3. Mengevaluasi implementasi program nasional agar relevan dengan kebutuhan Papua.
	Rek. 8
	BP3OKP perlu memperkuat fungsi SHEK terhadap kebijakan dan implementasi sekolah berpola asrama.
	RTL. 8
	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap sekolah asrama.2. Menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait.3. Mengidentifikasi kendala SDM, sarpras, pembinaan, dan pendanaan.
Rek. 9	
Setiap program pendidikan nasional di Papua harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan hasil kajian komprehensif.	
RTL. 9	
<ol style="list-style-type: none">1. Melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan pendidikan.2. Melakukan uji kelayakan dan evaluasi dampak sebelum implementasi program.	



Rek. 10

1. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sarana, prasarana, dan perwajahan lingkungan sekolah di wilayah pinggiran dan pedalaman.
2. Perlu sinergi lintas OPD untuk mendukung perwajahan dan penataan lingkungan sekolah

RTL. 10

1. Mengalokasikan anggaran khusus penataan lingkungan sekolah.
2. Mengintegrasikan program pendidikan dengan PUPR dan lingkungan hidup.
3. Menetapkan sekolah prioritas rehabilitasi berbasis kondisi lapangan.
4. Membangun kolaborasi antara Dinas Pendidikan, PUPR, DLH, dan pihak swasta/CSR.
5. Menyusun program sekolah hijau dan sekolah sehat.

Rek. 11

1. Transparansi pengelolaan Dana Otsus pendidikan perlu diperkuat hingga tingkat sekolah.
2. Perlu sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Dana Otsus pendidikan lintas OPD agar tepat sasaran.
3. Dana Otsus perlu diarahkan lebih afirmatif untuk mendukung kebutuhan dasar peserta didik OAP.

RTL. 11

1. Menyampaikan informasi penggunaan Dana Otsus secara terbuka.
2. Melibatkan sekolah dalam perencanaan dan monitoring program pendidikan Otsus.
3. Membuat dashboard informasi Dana Otsus pendidikan.
4. Membentuk forum koordinasi pengelolaan Dana Otsus pendidikan.
5. Menyusun peta program dan anggaran pendidikan lintas OPD.
6. Menghindari tumpang tindih program.
7. Mengembangkan program bantuan perlengkapan sekolah dan transportasi siswa.
8. Memberikan kewenangan terbatas kepada sekolah dalam pengelolaan bantuan afirmasi siswa.



9. Melakukan pendataan siswa rentan berbasis *by name by address*.

Rek. 12

Perlu mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif terhadap Dana Otsus yang dikelola sekolah.

RTL. 12

1. Menyusun SOP pengelolaan dan pelaporan Dana Otsus sekolah.
2. Melibatkan komite sekolah, masyarakat, dan inspektorat dalam pengawasan.
3. Mengembangkan sistem pelaporan digital dan monitoring berkala.

Rek. 13

Pengembangan kompetensi pertanian perlu diarahkan pada sertifikasi keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal.

RTL. 13

1. Membangun kerja sama dengan BLK, SMK pertanian, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi profesi.
2. Mengembangkan sekolah vokasi berbasis pertanian lokal dan ketahanan pangan.
3. Menyelenggarakan pelatihan, magang, dan sertifikasi kompetensi bagi siswa Papua Pegunungan.

Dokumentasi





Next Keg...2

Kegiatan 2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	Hari/Tgl : Selasa- Rabu, 14-15 April 2026 Pukul : 08.00 - 20.00 09.00 - 01.30 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan
	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 Undangan Bupati Merauke tentang MUSRENBANG OTSUS Insidentil : Sebutkan Alasannya
	Perintah Kerja
	Surat Tugas Nomor Tanggal
	Lokasi Kegiatan : Aula BAPERIDA Kabupaten Merauke
Judul Kegiatan	: MUSRENBANG OTSUS Kabupaten Merauke
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Rencana Program Percepatan Pembangunan Kabupaten Merauke dalam Rangka Otsus Papua sesuai RIPP dan RAPP tahun 2025-2029
Pelaksana Kegiatan	: Permerintah Kabupaten Merauke
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: SHEK Rencana Program sesuai RIPP dan RAPP Tahun 2025 - 2029
Hasil/output Kegiatan	:



	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 20262. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke terlaksana sebagian besar telah mengikuti Permen PPN No.1 Tahun 20253. Proses pelaksanaan Musrenbang dilakukan melalui pembahasan usulan per OPD.4. Perwakilan Pimpinan dari setiap OPD Kabupaten Merauke sebagian besar diwakili oleh sekretaris bersama staf dinas terkait5. Pelaksanaan Musrenbang Otsus pada SIPPP sudah menggunakan Rancangan RKPD 2027 yang dialirkan secara otomatis dari SIPD ke SIPPP Kabupaten Merauke6. Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang diusulkan sebagaian besar sesuai yang termuat dalam RAPP.7. Sebagian besar OPD tidak menyebutkan secara detail terkait sumber pengusul kegiatan.8. Masih adanya usulan kegiatan baru yang urgen dari beberapa OPD yang ditambahkan pada SIPPP9. Akhir dari pembahasan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara.10. Tersedianya usulan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan pada Musrenbang Provinsi Papua Selatan11. Tidak semua usulan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dari setiap OPD dapat di akomodir, karena menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: Rekomendasi
	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Musrenbang Otsus<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tetap selaras dengan ketentuan Permen PPN No. 1 Tahun 2025 serta kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.▪ Perlu penguatan kualitas substansi pembahasan agar seluruh usulan program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.2. Peningkatan Keterlibatan Pimpinan OPD



	<ul style="list-style-type: none">▪ Kehadiran pimpinan OPD secara langsung dalam Musrenbang Otsus perlu ditingkatkan untuk memastikan pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan secara optimal tanpa ketergantungan penuh kepada sekretaris atau staf teknis.
	3. Penguatan Integrasi SIPD dan SIPPP
	<ul style="list-style-type: none">▪ Integrasi antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) perlu terus diperkuat agar sinkronisasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berjalan efektif, akurat, dan real-time.
	4. Peningkatan Ketepatan Usulan Program
	<ul style="list-style-type: none">▪ Setiap OPD perlu memastikan bahwa usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan benar-benar mengacu pada Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), RIPPP, RPJMD, serta prioritas kebutuhan masyarakat OAP.
	5. Kejelasan Sumber Usulan Program
	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu adanya penegasan mekanisme pencantuman sumber usulan kegiatan secara rinci dan jelas, baik berasal dari kampung, distrik, masyarakat adat, hasil Musrenbang distrik, maupun aspirasi sektoral lainnya.
	6. Pengendalian Penambahan Usulan Baru
	<ul style="list-style-type: none">▪ Penambahan usulan kegiatan baru yang bersifat urgen perlu tetap dibuka ruangnya, namun harus melalui mekanisme verifikasi, validasi, dan penyesuaian prioritas agar tidak mengganggu konsistensi dokumen perencanaan.
7. Prioritisasi Program Sesuai Kapasitas Fiskal	
<ul style="list-style-type: none">▪ Mengingat keterbatasan anggaran, seluruh OPD perlu menyusun skala prioritas program secara lebih selektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).	
8. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas	
<ul style="list-style-type: none">▪ Proses penetapan usulan prioritas dan hasil Musrenbang Otsus perlu dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.	
: Rencana Tindak Lanjut (RTL)	



	1. Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus <ul style="list-style-type: none">Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Merauke sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya.
	2. Peningkatan Kapasitas OPD <ul style="list-style-type: none">Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada OPD terkait penyusunan usulan program berbasis RAPP, RIPP, dan penggunaan SIPP.
	3. Penguatan Kehadiran Pimpinan OPD <ul style="list-style-type: none">Pemerintah daerah perlu mengeluarkan surat penegasan agar pimpinan OPD wajib hadir secara langsung dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus strategis.
	4. Penyempurnaan Mekanisme SIPP <ul style="list-style-type: none">Melakukan penyempurnaan fitur pada SIPP terkait identifikasi sumber usulan program, validasi usulan prioritas, dan sinkronisasi otomatis dengan SIPD.
	5. Verifikasi Usulan Tambahan <ul style="list-style-type: none">Membentuk tim verifikasi untuk menilai usulan kegiatan baru yang bersifat urgen agar tetap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal.
	6. Penyusunan Skala Prioritas Program <ul style="list-style-type: none">Setiap OPD diminta menyusun ranking prioritas program berdasarkan urgensi, dampak terhadap masyarakat OAP, dan kesesuaian dengan target pembangunan daerah.
	7. Penguatan Dokumentasi dan Berita Acara <ul style="list-style-type: none">Memastikan seluruh hasil pembahasan dan keputusan Musrenbang terdokumentasi secara lengkap melalui berita acara yang ditandatangani seluruh pihak terkait.
	8. Koordinasi Persiapan Musrenbang Provinsi <ul style="list-style-type: none">Melakukan koordinasi lanjutan dengan BP3OKP, Bappeda, dan OPD terkait untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Merauke pada Musrenbang Provinsi Papua Selatan.
	9. Monitoring dan Pengawasan Program Prioritas <ul style="list-style-type: none">Melakukan monitoring berkala terhadap usulan program prioritas yang telah disepakati agar dapat terakomodir dalam RKPD dan penganggaran tahun berjalan.



10. Peningkatan Transparansi Informasi

- Menyampaikan hasil Musrenbang Otsus kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media informasi daerah sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas publik.



Dokumentasi



Next Keg...3

Kegiatan 3	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	Hari/Tgl : Selasa-Rabu, 21-22 April 2026
	Pukul : 08.00 - 17.00 08.00 - 20.00 WIT
	Dasar Pelaksanaan Kegiatan
	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
Undangan Gubernur Provinsi Papua Selatan tentang MUSRENBANG OTSUS dan RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027	
Insidental : Sebutkan Alasannya	
Perintah Kerja	



BPP
BADAN PENGARAH PAPUA



Surat Tugas Nomor .
..... Tanggal
.....

Lokasi Kegiatan	Swissbell Hotel Merauke
Judul Kegiatan	MUSRENBANG OTSUS dan MUSRENBANG RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Rencana Program Percepatan Pembangunan Kabupaten Merauke dalam Rangka Otsus Papua sesuai RIPPP dan RAPPP tahun 2025-2029
Pelaksana Kegiatan	: Permerintah Kabupaten Merauke
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: SHEK Rencana Program sesuai RIPPP dan RAPPP Tahun 2025 - 2029

Hasil/output Kegiatan	:
	1. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2026
	2. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan terlaksana sebagian besar telah mengikuti Permen PPN No.1 Tahun 2025
	3. Pembukaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan dihadiri seluruh Jajaran Pimpinan dan staf Provinsi Papua Selatan, serta seluruh jajaran pimpinan dan staf 4 (empat) Kabupaten selingkung Provinsi Papua Selatan
	4. Teknis Pelaksanaan Murenbang tingkat Provinsi Papua Selatan dilakukan perdesk sesuai mandatori spending.
	5. Setiap Desk difasilitasi oleh Tim Kerja dari Baperida Provinsi dan Kepala Dinas beserta Jajaran Pimpinan dan Staf dari OPD terkait pada Provinsi Papua Selatan. Untuk Pengusul Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dari tingkat Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD dari masing-masing Kabupaten



	<p>6. Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang diusulkan sebageian besar sesuai yang termuat dalam RAPPP.</p> <p>7. Masih adanya usulan kegiatan baru yang urgen dari dari Kabupaten Pengusul yang ditambahkan pada SIPPP dan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua Selatan</p> <p>8. Akhir dari pembahasan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara.</p> <p>9. Tidak semua usulan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dari setiap Kabupaten dapat di akomodir, karena menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan.</p>
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: Rekomendasi
	<p>1. Penguatan Pelaksanaan Musrenbang Otsus Sesuai Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar konsisten mengacu pada Permen PPN No. 1 Tahun 2025 serta mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua secara efektif dan terarah.
	<p>2. Penguatan Komitmen dan Keterlibatan Pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kehadiran seluruh pimpinan OPD provinsi dan kabupaten perlu terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyusunan program pembangunan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
	<p>3. Optimalisasi Mekanisme Perdesk</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan pembahasan melalui mekanisme perdesk sesuai mandatory spending perlu terus dioptimalkan agar proses sinkronisasi usulan program antar tingkat pemerintahan berjalan lebih fokus, efektif, dan tepat sasaran.
	<p>4. Penguatan Sinkronisasi Program dengan RAPPP dan RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu terus dipastikan selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), RIPP, RPJMD Provinsi Papua Selatan, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.
	<p>5. Pengendalian dan Validasi Usulan Baru</p>



	<ul style="list-style-type: none">▪ Penambahan usulan kegiatan baru yang bersifat urgen perlu tetap diberikan ruang, namun harus melalui proses verifikasi, validasi, dan penilaian prioritas secara objektif agar tidak mengganggu konsistensi dokumen perencanaan.
	6. Penguatan Peran SIPPP
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemanfaatan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) perlu terus diperkuat sebagai instrumen sinkronisasi, harmonisasi, monitoring, dan dokumentasi usulan program Otsus Papua.
	7. Prioritisasi Program Berdasarkan Dampak
	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur prioritas.
	8. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
	<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh proses pembahasan, penetapan prioritas, dan hasil Musrenbang Otsus perlu terdokumentasi secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan.
	: Rencana Tindak Lanjut (RTL)
	1. Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan Tahun 2026 sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Musrenbang tahun berikutnya.
	2. Penyempurnaan Sinkronisasi SIPPP dan Dokumen Perencanaan
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penyempurnaan integrasi antara SIPPP, RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya agar usulan program dapat terpantau secara lebih sistematis dan terukur.
	3. Penguatan Kapasitas OPD
	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD provinsi maupun kabupaten terkait penyusunan usulan program berbasis RAPP, mandatory spending, dan penginputan SIPPP.
	4. Verifikasi dan Validasi Usulan Tambahan



	<ul style="list-style-type: none">• Membentuk tim verifikasi lintas OPD untuk menilai usulan kegiatan baru yang ditambahkan oleh kabupaten agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal.
	5. Penyusunan Skala Prioritas Program
	<ul style="list-style-type: none">• Setiap OPD provinsi dan kabupaten diminta menyusun ranking prioritas program berdasarkan urgensi, manfaat langsung bagi masyarakat OAP, dan capaian target pembangunan.
	6. Penguatan Koordinasi Provinsi dan Kabupaten
	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan rapat koordinasi lanjutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kesinambungan program prioritas hasil Musrenbang.
	7. Finalisasi dan Pengawasan Berita Acara
	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan program dituangkan secara lengkap dalam berita acara dan dijadikan dasar pengawasan dalam proses penganggaran
	8. Monitoring dan Pengawasan Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring berkala terhadap usulan prioritas yang telah disepakati agar dapat terakomodir dalam RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027 dan dokumen penganggaran terkait.
	9. Penguatan Fungsi SHEK
	<ul style="list-style-type: none">• BP3OKP bersama pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mengawal implementasi program Otsus Papua di Papua Selatan
	10. Publikasi Hasil Musrenbang
	<ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan hasil dan prioritas Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media informasi resmi pemerintah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.



BPP
BADAN PENGARAH PAPUA



Dokumentasi



Next Keg...4

Kegiatan 4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl : Rabu, 29 April 2026
Pukul : 10.00 - Selesai WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan
Insidentil : Sebutkan Alasannya
Perintah Kerja
Surat Tugas Nomor .
..... Tanggal
.....

Lokasi Kegiatan	: Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan KTM Salor Merauke
Judul Kegiatan	: Rapat Dengan Pendapat Komisi III DPR Papua Selatan bersama Mitra Kerja dan Pihak Terkait
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Rencana Program Percepatan Pembangunan Kabupaten Merauke dalam Rangka Otsus Papua sesuai RIPPP dan RAPPP tahun 2025-2029
Pelaksana Kegiatan	: Komisi III DPR Papua Selatan



Peserta Kegiatan : Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Komisi III DPR Papua Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, dan Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Se Papua Selatan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : SHEK tentang Keluhan yang berkembang di lingkungan Civitas Akademik Se-Papua Selatan

Hasil/output Kegiatan :

1. Kurangnya pembiayaan dalam operasional penyelenggaraan perguruan tinggi pada perguruan tinggi swasta karena sebagian besar mahasiswa adalah orang asli papua yang berasal dari keluarga tidak mampu
2. Terbatasnya beasiswa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembelajaran.
4. Dukungan pembiayaan pada kesejahteraan dosen sangat terbatas karena banyak dari mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya UKT.
5. Adanya pendanaan Hibah dari Pemerintah Pusat, namun tidak semua Perguruan Tinggi Swasta dapat memperoleh hibah tersebut.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut : **Rekomendasi**

1. Penguatan Dukungan Pendanaan Perguruan Tinggi Swasta
 - Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih optimal bagi perguruan tinggi swasta, khususnya yang mayoritas mahasiswanya adalah Orang Asli Papua (OAP) dari keluarga kurang mampu.
 - Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan perlu diarahkan secara afirmatif untuk mendukung keberlangsungan operasional perguruan tinggi swasta di Papua Selatan.
 - Perlu adanya kebijakan khusus terkait bantuan operasional pendidikan tinggi berbasis afirmasi OAP.
2. Perluasan Program Beasiswa
 - Pemerintah daerah perlu memperluas cakupan penerima beasiswa bagi mahasiswa OAP pada perguruan tinggi swasta.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu penguatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk meningkatkan kuota beasiswa afirmasi Papua.▪ Program beasiswa perlu disesuaikan dengan kebutuhan strategis pembangunan Papua Selatan, khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, teknik, dan ekonomi kreatif.▪ Perlu adanya skema bantuan biaya pendidikan darurat bagi mahasiswa berisiko putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. <hr/> <p>3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana perguruan tinggi swasta secara bertahap dan berkelanjutan.▪ Perlu penguatan dukungan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi, laboratorium, perpustakaan, dan jaringan internet.▪ Perguruan tinggi swasta perlu diprioritaskan dalam program bantuan sarana pendidikan dari pemerintah pusat maupun daerah. <hr/> <p>4. Penguatan Kesejahteraan Dosen</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan dosen pada perguruan tinggi swasta melalui dukungan insentif, tunjangan, dan program peningkatan kapasitas SDM.▪ Perlu adanya skema dukungan pemerintah terhadap pembayaran honorarium dosen pada perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan pendapatan institusi.▪ Program peningkatan kompetensi dosen, sertifikasi, studi lanjut, dan pelatihan perlu diperluas secara afirmatif bagi dosen di Papua Selatan. <hr/> <p>5. Penguatan Akses Hibah dan Kemitraan</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah pusat perlu memperluas akses hibah pendidikan tinggi secara lebih adil dan afirmatif bagi perguruan tinggi swasta di Papua Selatan.▪ Perguruan tinggi swasta perlu diberikan pendampingan teknis dalam penyusunan
--	--



	<p>proposal hibah dan penguatan tata kelola kelembagaan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perlu dibangun kemitraan strategis antara perguruan tinggi swasta, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga donor, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi.
	<p>: Rencana Tindak Lanjut (RTL)</p>
	<p>1. Melakukan pendataan kondisi keuangan, jumlah mahasiswa OAP, dan kebutuhan operasional perguruan tinggi swasta</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan, LLDIKTI, Perguruan Tinggi
	<p>2. Menyusun skema bantuan operasional afirmatif bagi perguruan tinggi swasta</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov Papua Selatan, DPRD
	<p>3. Mengusulkan peningkatan kuota beasiswa afirmasi Papua kepada pemerintah pusat</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov, BP3OKP, Perguruan Tinggi
	<p>4. Menyusun program bantuan pendidikan bagi mahasiswa OAP kurang mampu</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan, Kesra, Bappeda
	<p>5. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai dukungan sarana-prasarana pendidikan tinggi</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov, LLDIKTI
	<p>6. Mengidentifikasi kebutuhan prioritas sarana dan prasarana perguruan tinggi swasta</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Perguruan Tinggi, Pemda
	<p>7. Menyusun program peningkatan kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov, BKPSDM, LLDIKTI
	<p>8. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal hibah bagi perguruan tinggi swasta</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : LLDIKTI, Kemendikbudristek
	<p>9. Membangun kemitraan pembiayaan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan CSR</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov, Perguruan Tinggi



10. Melakukan monitoring dan evaluasi dukungan Dana Otsus untuk pendidikan tinggi

- Penanggung Jawab : BP3OKP, Inspektorat, BPKP

Dokumentasi

:



Next Keg...5

Kegiatan 5

Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Hari/Tgl : Kamis, 30 April 2026
Pukul : 09.00 - Selesai WIT

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Kegiatan Anggaran BP3OKP PPS Tahun 2026

Undangan ...

Insidental : Sebutkan Alasannya

Perintah Kerja

Surat Tugas Nomor
..... Tanggal
.....



Lokasi Kegiatan : Ruang Rapat KPPN - BP3OKP PPS JL. Prajurit Merauke



BPP
BADAN PENGARAH PAPUA



Judul Kegiatan	: Audensi kolaborasi sinergi membangun Papua melalui diskusi langsung bersama beberapa Lembaga Strategis se Papu Selatan
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Damai
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: SHEK Rencana Program Percepatan Pembangunan Kabupaten Merauke dalam Rangka Otsus Papua sesuai RIPP dan RAPP tahun 2025-2029
Pelaksana Kegiatan	: BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif dan Pokja Papua Damai, Majelis Rakyat Papua (MRP), Anggota DPR Afirmasi (DPR P), Anggota DPR Afirmasi (DPR K) 4 Kabupaten, Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Kesbangpol 4 Kabupaten, Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat 4 Kabupaten, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: SHEK merealisasikan kolaborasi sinergi membangun Papua, khususnya Papu Selatan

Hasil/output Kegiatan

1. Perlunya Data terpilih OAP;
2. Ada 92000 Anak2 yang tidak bersekolah dan putus sekolah di PPS, bagaimana jika ada intervensi lewat bantuan studi melalui Bapeda PPS, sehingga penyaluran dan penyerapan Dana Otsus tepat sasaran pada peneriman manfaatnya;
3. Persoalan Penduduk ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian yaitu tentang penataan penduduk dan pengendalian penduduk, karena berdampak pada pada layanan kesejahteraan dll, bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki identas/yang tidak terdata, Ada 80% penduduk tidak terdata;
4. Bagaimana dengan Pengendalian penduduk?. Perlu dilakukan diskusi Bersama Dukcapil, karena ada 4000 org masuk dari luar, hal ini berdampak pada akan terjadi marginalisasi OAP yang akan tersisi;
5. Perlu adanya penegasan dan pemahaman bersama terkait dengan kewenangan dalam Musrebang Kabupaten dan Provinsi, Bagaimana pembagian Dana Otonomi Khusus antara Prov dan Kab;



6. Terkait dengan pengawasan pembagian Dana Otonomi Khusus, sebaiknya dilakukan sejak dari Perencanaan!!!.
7. Adanya Hasil pertemuan bersama Gubernur sebaiknya dilakukan usulan terkait dengan belanja harus terpisah antara Dana otonomi khusus dan Dana lainnya (Cek regulasi!!!);
8. Usulan terkait regulasi utk pembahasan substansi;
9. Perlu unit share tentang pembatasan kewenangan terkait dengan pengusulan calon gubernur dimasa yang akan datang.
10. Perlu adanya penegasan tentang DPR Parpol dan DPR Afirmasi, karena beda pintu masuk, hadirnya Afirmasi karena adanya Otonomi Khusus Papua, kenapa kewenangan yang diberikan dibatasi (perlu diperjelas dalam sebuah regulasi yang konkrit), Krn bauran kelengkapan dewan, Ketika ada masalah OAP baru bersuara;
11. Bagaimana dengan Dana Otonomi Khusus yang digunakan Bersama-sama, untuk itu perlu adanya penjelasan tentang tata Kelola keuangan antara DPR Parpol dan DPR afirmasi!!!;
12. Usul untuk pertemuan lanjutan antara Lembaga (BP3OKP, MRP, DPR Afirmasi dan Instansi pemerintah yang terkait) sebaiknya dilakukan secara periode dan berkelanjutan;
13. Apakah bisa adanya Kerjasama antara DPR Afimasi dengan Pokja-pokja BP3OKP agar besinergi SHEK?, selanjutnya bagaimana proses dan mekanisme kolaborasi.
14. Fungsi BP3OKP hanya Koordinatif sesuai dengan UU No.2 tahun 2021 Pasal 68A, apa saja yang sudah dilakukan BP3OKP dalam 2 tahun berjalan agar disampaikan kepada MRP;
15. Untuk pencapapain Pokja : Misal penunjang Infrastruktur, sejauh ini apa yang sudah di koordinir oleh BP3OKP, dan % pencapaian yang dapat diperlihatkan dalam tata laksana keuangan Otsus, karena DTI tidak mampu/cukup dalam percepatan Pembangunan dalam rangka Otsus;
16. Bagaimana dengan peningkatan SDM yang merupakan masalah Klasik dan berulang, karena tidak ada Blueprint tentang SDM;



17. Dalam proses peningkatan SDM seharusnya target pencapaian disepakati oleh Provinsi dan Kabupaten, dengan merujuk hasil koordinasi dari Kementerian terkait, dan bagaimana jika belum adanya orientasi, maka kita harus kemana?;
18. Bagaimana dengan Papua Produktif dalam percepatannya sampai saat ini tidak jelas pembagian anggaran untuk mendukung pencapaian Papua Makmur dan Sejahtera;
19. Perlu untuk menjadi perhatian dalam melihat Papua Produktif, terkait ekonomi kerakyatan, dan bagaimana keterukurannya?
20. Usul perkuat kelembagaan, antara MRP dan DPR afirmasi, perkuat posisi di DPR, segera melakukan Kaukus Papua (Gabungan Lembaga);
21. Usulan kepada BP3OKP melakukan :
 - e. koordinasi k/l terkait tentang pengganti PP.54, agar masuk RPP pada komisi 2 untuk melakukan pengawasaan Budgeting;
 - f. perkuat fungsi kelembagaan DPR Afirmasi;
 - g. Komunikasi tentang Peraturan Pemerintah untuk memperjelas Posisi DPR Afirmasi!!!;
 - h. Kab. Mappi Kekurangan Transformasi dan akselerasi Infrstruktur, harus ada ruas jalan terbangun untuk mengurangi kos;
22. Perlu adanya pendampingan bagi pelaku Ekonomi dan permudah akses permodalan (identifikasi OAP) justifikasi tugas2 Lembaga utk mendukung pencapaian OAP Makmur dan Sejahtera;
23. Mendorong pembentukan Lembaga pendamping ekonomi agar bagaimana bisa berjalan seiring;
24. Pikirkan regulasi terkait Musrenbang dengan sangsi terkait melibatkan Lembaga-Lembaga, lihat Permen Bapenas No.1 tahun 2025.
25. Usul BP3OKP untuk bersinergi Bersama MRP dalam melakukan peningkatan Kapasitas pendampingan dan pengawasan Tata Kelola OTSUS bersama Kementerian terkait (Kemenkeu).;
26. Bagaimana dengan peningkatan kapasitas Pengusaha OAP agar memperoleh ruang dan kesempatan berkontribusi yang seluas-luasnya dalam percepatan Pembangunan melalui OTSUS dan kesinambungan dalam



	Pembangunan Papua Selatan yang berkelanjutan?
27.	DPRP terkait dengan PP 54 dan 64 soal keuangan, tidak bisa kolaborasi krn Anggaran terbatas, untuk itu perlu segera perjuangkan Perdasus !!!.
28.	Musrenbang diharapkan adanya dinamika antara pemerintah sebagai pemateri dan perlu mempertimbangkan keberadaan DPR Afirmasi yang baru dilantik dan butuh penyesuaian kerja di DPR.
29.	Dampak dari penyesuaian DPR Afirmasi dengan kondisi riil, dimana mengahdapi situasi penyesuaian menjadi Dilema, sehingga pemahaman kewenangan terkesan tidak maksimal dalam menghadapi tugas pelaksanaan OTSUS.
30.	Kurangnya pemahaman DPR Afirmasi tentang proteksi OTSUS yang tidak merata.
31.	Proses adaptasi yang tidak nyaman karena adanya penggunaan Dana Otsus oleh DPR Partai Politik!!!.
32.	Adanya kendala pelaksanaan tugas DPR Afirmasi dalam 5 tahun tidak ada hasil yang dicapai.
33.	Tidak berpihaknya Sistem yang digunakan dalam rangka otsus pada Lembaga.
34.	Keresahan Parpol terkait OTSUS dan RKPD perlu ditinjau lagi;
35.	Sistem keuangan yang tidak mengcover usulan kebutuhan Otsus yang ditolak- Tidak sesuai RAP3.
36.	perlu adanya Tindakan lanjutan dengan melakukan koordinasi Bersama Kementerian Terkait tentang penggunaan system dalam rangka Otsus;
37.	Sejak 1963 Papua bergabung dengan NKRI, biaya yang sudah dikeluarkan sudah triliun, pada tahun 1969 jumlah OAP 800 orang, dengan jumlah penduduk awal dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan serta APBN setiap tahun milyaran, kenapa sampai saat ini OAP tidak maju-maju?, Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dari awal, Dimana Musrenbang tingkat Distrik seharusnya kita Wajib hadir, Seharusnya para pengambil keputusan dan unsur-unsur terkait harus ada hadir, agar mengetahui apa saja program yang



	<p>diusulkan dan harus dikawal sampai realisasi, sehingga tidak muncul lagi pertanyaan kenapa usulan program yang diusulkan pada saat Muskam tidak ada dalam realisasi program Pembangunan;</p>
	38. Data terkait Pendidikan, data real Wajib ada;
	39. Usul PSN yang masuk tanpa kompromi Bersama Masyarakat Adat, berdampak pada keresahan masyarakat, bagaimana dampak PSN terhadap keberlangsungan hidup Masyarakat adat?;
	40. Perdasus perlindungan hak-hak OAP dalam menjalani dan menghadapi perkembangan global dalam percepatan Pembangunan Papua!!!
	41. Tugas dari Lembaga yang keluar dari Rahim Otsus; Kita harus membentuk Kaukus;
	42. Hasil pertemuan Bangar Dana Otsus masuk 1 pintu yang dikelola oleh Kasda, bisakah didorong Dirjen OTDA, untuk Dana Otsus sebaiknya dikelola oleh badan khusus, sehingga dikelola terpisah sehingga tidak digabung dengan OPD, Karena Implementasi 80 20 tidak berjalan, dan seharusnya perlu Regulasi perdasu dan aturan lainnya karena pergub dan perbub tidak kuat;
	43. Setelah pertemuan ini bentuk kaukus, dan sebaiknya pertemuan seperti ini tetap berlanjut secara berkala, dan salah satu agenda yang perlu untuk dibahas bagaimana pengawasan pelaksanaan Otsus di monitoring berkala, dan perlu adanya pendampingan DPR dan MRP dalam manajemen sistem pengelolaan tata laksana Otsus
	44. Pertegas Permen Bapenas No. 1 Tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan Musrendabg pada tingkat Kabupaten dan Provinsi, segera perlu di tindaklanjuti;
	45. Pertegas dan perjelas hak MRP dan DPR Afirmasi dalam melaksanakan tugas mengusulkan Perdasus;
	46. Sebagian besar OPD tidak memahami tata kelola Otsus, sehingga berdampak pada kegagalan OTSUS.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: Rekomendasi
	1. Penguatan Basis Data Orang Asli Papua (OAP) <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Kabupaten/Kota perlu segera menyusun dan



	<p>menetapkan basis data terpadu OAP yang valid, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Perlu dilakukan sinkronisasi data OAP antara Dukcapil, BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BP3OKP, dan OPD terkait.▪ Pendataan anak tidak sekolah dan putus sekolah perlu menjadi program prioritas daerah berbasis distrik dan kampung.▪ Dana Otsus bidang pendidikan diarahkan berbasis data penerima manfaat agar tepat sasaran khususnya bagi OAP
	<p>2. Penguatan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus</p>
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu memperjelas mekanisme pembagian kewenangan dan pengelolaan Dana Otsus antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.▪ Pengawasan Dana Otsus harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.▪ Perlu adanya pemisahan nomenklatur belanja Dana Otsus dengan sumber dana lainnya dalam sistem penganggaran daerah.▪ Pemerintah daerah perlu mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasu terkait tata kelola Dana Otsus yang lebih kuat dan terukur.▪ OPD perlu diberikan peningkatan kapasitas terkait tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dana Otsus.
	<p>3. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Otsus</p>
	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu percepatan pembahasan regulasi turunan terkait Otsus Papua, termasuk penguatan pengganti PP Nomor 54 dan regulasi terkait DPR Afirmasi.▪ Perlu penegasan kewenangan DPR Afirmasi, MRP, dan BP3OKP dalam pengawasan dan pengusulan kebijakan Otsus.▪ Perlu dibentuk forum bersama atau Kaukus Papua yang melibatkan BP3OKP, DPR Afirmasi, MRP, Pemerintah Daerah, dan unsur strategis lainnya.▪ Pertemuan koordinasi lintas lembaga perlu dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
<p>4. Penguatan Sistem Musrenbang Otsus</p>	
<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan Musrenbang Otsus perlu memastikan keterlibatan aktif seluruh unsur	



	<p>terkait sejak tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Permen PPN Nomor 1 Tahun 2025 perlu dipertegas implementasinya melalui pedoman teknis daerah.▪ Perlu penguatan mekanisme pengawasan terhadap konsistensi usulan program dari Musrenbang sampai realisasi anggaran.▪ Sistem SIPPP dan SIPD perlu disempurnakan agar mampu mengakomodasi kebutuhan khusus Otsus Papua.
	<p>5. Penguatan Pembangunan SDM Papua</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu menyusun Blueprint Pengembangan SDM Papua Selatan berbasis kebutuhan daerah.▪ Target peningkatan SDM perlu disepakati secara bersama antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait.▪ Program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi perlu diarahkan sesuai potensi unggulan daerah dan kebutuhan pasar kerja.▪ Perlu penguatan afirmasi pendidikan dan pelatihan bagi OAP secara berkelanjutan.
	<p>6. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengusaha OAP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu memperkuat pendampingan usaha ekonomi masyarakat dan pelaku usaha OAP.▪ Perlu dibentuk lembaga pendamping ekonomi OAP yang terintegrasi dengan akses permodalan dan pasar.▪ Pengusaha OAP perlu diberikan ruang prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengadaan barang/jasa.▪ Program Papua Produktif perlu memiliki indikator keterukuran yang jelas dan berbasis hasil.
	<p>7. Penguatan Infrastruktur dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar khususnya di wilayah terisolir dan distrik terpencil.▪ Program Strategis Nasional (PSN) di Papua perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat melalui konsultasi dan persetujuan yang partisipatif.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu percepatan penyusunan regulasi perlindungan hak-hak OAP dalam menghadapi percepatan pembangunan dan investasi.
	: Rencana Tindak Lanjut (RTL)
	1. Melakukan pendataan terpadu OAP dan anak tidak sekolah berbasis distrik dan kampung
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dukcapil, Dinas Pendidikan, BPS, BP3OKP• Tahun : 2026
	2. Menyusun Blueprint Pengembangan SDM Papua Selatan
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov Papua Selatan, Bappeda, BP3OKP• Tahun : 2026
	3. Melaksanakan koordinasi bersama Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu terkait regulasi penguatan tata kelola Otsus
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : BP3OKP, DPRD, MRP• Tahun : 2026
	4. Membentuk Forum/Kaukus Papua lintas lembaga
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : BP3OKP, MRP, DPR Afirmasi• Tahun : 2026
	5. Menyusun rekomendasi Perdasus dan Perdasi terkait pengelolaan Dana Otsus
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : DPRD, Pemprov Papua Selatan• Tahun : 2026
	6. Melakukan penguatan kapasitas OPD terkait tata kelola Dana Otsus
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Bapperida, Inspektorat, BP3OKP• Tahun : Berkala
	7. Melakukan evaluasi sistem SIPPP dan SIPD dalam mendukung pengelolaan Otsus
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Bapperida, Kemendagri• Tahun : 2026
	8. Menyelenggarakan forum koordinasi rutin pengawasan Otsus
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : BP3OKP, MRP, DPR Afirmasi• Tahun : Persemester
	9. Menyusun program afirmasi pendidikan dan bantuan studi berbasis data OAP
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan, Bappeda



	<ul style="list-style-type: none">• Tahun : Tahun Anggaran 2027
	10. Menyusun program pendampingan dan akses permodalan bagi pelaku usaha OAP
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dinas Koperasi dan UMKM, BP3OKP• Tahun : 2026 - 2027
	11. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar wilayah terisolir
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Pemprov, Kabupaten, PUPR• Tahun : Berkelanjutan
	12. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Otsus secara berkala
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : BP3OKP, Inspektorat, BPKP• Tahun : Berkala
	13. Melaksanakan sosialisasi kewenangan dan fungsi lembaga Otsus kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : BP3OKP, MRP, DPRD• Tahun : Berkala
	14. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian dan penataan penduduk
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : Dukcapil, Kesbangpol, Pemda• Tahun : 2026
	15. Menyusun regulasi perlindungan hak-hak OAP dalam pembangunan dan investasi
	<ul style="list-style-type: none">• Penanggung Jawab : DPRD, Pemprov Papua Selatan• Tahun : 2026 -2027

Dokumentasi





1.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) tingkat Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permen PPN Nomor 1 Tahun 2025, khususnya dalam penggunaan sistem SIPPP, pembahasan program prioritas, serta penandatanganan berita acara hasil kesepakatan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala dalam aspek sinkronisasi data, pemahaman kewenangan, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum seluruh usulan prioritas dapat terakomodasi.
2. Masih terdapat persoalan mendasar terkait tata kelola Dana Otsus, terutama menyangkut transparansi, pengawasan sejak tahap perencanaan, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta mekanisme pengelolaan keuangan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi program pembangunan manusia Papua.
3. Bidang pendidikan masih menghadapi tantangan serius, antara lain:
 - a. Tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah;

- b. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah pinggiran dan pedalaman;
 - c. Belum optimalnya implementasi sekolah berpola asrama sesuai tujuan awal;
 - d. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru dan dosen;
 - e. Keterbatasan beasiswa serta dukungan pembiayaan bagi perguruan tinggi swasta yang sebagian besar melayani mahasiswa OAP dari keluarga tidak mampu.
4. Persoalan data kependudukan dan data OAP masih menjadi tantangan besar, termasuk tingginya jumlah penduduk yang belum terdata dan lemahnya pengendalian penduduk. Hal ini berpotensi menimbulkan marginalisasi OAP dan menghambat ketepatan sasaran program pembangunan dan Dana Otsus.
 5. Kelembagaan pelaksana Otsus seperti BP3OKP, MRP, DPR Afirmasi, dan OPD terkait masih membutuhkan penguatan kapasitas, harmonisasi kewenangan, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan Otsus dapat berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.
 6. Sebagian besar peserta kegiatan menilai bahwa pembangunan Papua, khususnya Papua Selatan, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal Papua, bukan sekadar mentransformasi model pembangunan dari luar yang belum tentu relevan dengan kondisi sosial, budaya, geografis, dan ekonomi masyarakat Papua.
 7. Perlunya regulasi yang lebih kuat, konkret, dan operasional, baik dalam bentuk Perdasus, Perdasi, maupun regulasi turunan lainnya untuk memperjelas tata kelola Otsus, kedudukan DPR Afirmasi, mekanisme pengawasan, pengelolaan Dana Otsus, perlindungan hak-hak OAP, serta penguatan peran lembaga-lembaga yang lahir dari amanat Otsus Papua.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah **Saran Strategis** untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan:



1. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten perlu memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan Dana Otsus secara terintegrasi, transparan, dan berbasis data OAP yang valid agar program pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
2. Perlu segera dilakukan penyusunan dan penguatan regulasi daerah, khususnya Perdasus dan Perdasi, terkait:
 - a. Tata kelola Dana Otsus;
 - b. Penguatan kelembagaan DPR Afirmasi dan MRP;
 - c. Perlindungan hak-hak OAP;
 - d. Pengelolaan pendidikan berpola asrama;
 - e. Pengawasan pelaksanaan Otsus;
 - f. Mekanisme pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten
3. Pemerintah daerah bersama BP3OKP, MRP, DPR Afirmasi, dan OPD terkait perlu membentuk forum koordinasi atau kaukus Papua secara berkala guna memperkuat sinergi, harmonisasi kebijakan, serta pengawasan bersama terhadap pelaksanaan Otsus di Papua Selatan.
4. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi OPD, DPR Afirmasi, MRP, dan lembaga terkait mengenai tata kelola Otsus, mekanisme Musrenbang Otsus, pengawasan anggaran, serta pemanfaatan sistem SIPPP agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan optimal.
5. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan melalui:
 - a. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
 - c. Pengembangan sekolah berpola asrama yang sesuai kebutuhan Papua;
 - d. Perluasan akses beasiswa bagi peserta didik dan mahasiswa OAP;
 - e. Dukungan pembiayaan bagi perguruan tinggi swasta yang melayani mayoritas mahasiswa OAP
6. Perlu dilakukan percepatan pendataan penduduk dan validasi data OAP secara terpadu bersama Dukcapil dan instansi terkait sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengendalian penduduk, serta distribusi manfaat Dana Otsus secara adil dan tepat sasaran.



7. Dalam rangka mendukung Papua Produktif dan Papua Sejahtera, pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat OAP melalui:
 - a. Pendampingan usaha;
 - b. Kemudahan akses permodalan;
 - c. Penguatan kelembagaan ekonomi OAP;
 - d. Pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal Papua.
8. Pelaksanaan Musrenbang Otsus di tingkat distrik, kampung, kabupaten, dan provinsi perlu melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan secara aktif dan substantif agar seluruh usulan masyarakat benar-benar terakomodasi, dikawal, dan terealisasi sesuai kebutuhan riil masyarakat Papua.
9. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup masyarakat Papua.
10. Seluruh hasil rekomendasi kegiatan ini diharapkan menjadi bahan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan Otsus Papua Selatan yang lebih berpihak, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mempercepat terwujudnya Papua Selatan yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan April 2026, Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:

1. Menghadiri Undangan Sertijab Pangdam XXIV/Mandala Trikora Pada Tanggal, 10 April 2026 di Makodam XXIV/Mandala Trikora Merauke
2. Mengikuti Rapat Musrembang OTSUS Kabupaten Merauke Bertempat di Gedung Aula Kantor Bapperida Kabupaten Merauke Pada Tanggal, 14 April 2026
3. Menghadiri Undangan Narasumber Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Papua Selatan dari Bappenas Pada Hari, Kamis 16 April 2026 Bertempat di Gedung Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan
4. Mengikuti Rapat Musrembang OTSUS dan Musrembang RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2027, Bertempat di Gedung Aula Swissbell Hotel Merauke pada hari, Kamis-Jumat tanggal 21-24 April 2026
5. Menghadiri Undangan “Rapat Dengar Pendapat” DPR Provinsi Papua Selatan pada Tanggal 29 April 2026 Bertempat Di Gedung Aula Kantor DPR Provinsi Papua Selatan
6. Audiensi Bersama Lembaga MRP, DPRP, dan DPRK Affirmasidi Wilayah Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis, 30 April 2026 Bertempat di Gedung Aula Kantor BPP (Kompleks Kantor KPPN Merauke)

3.2 Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan April 2026. Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan komitmen bersama seluruh pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

- Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan koordinasi.
- Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

Merauke 08 Mei 2026

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si,MRSC

NIP: 999920240117145257